

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil objek penelitian Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Barang dan jasa. Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Kota Tasikmalaya periode Tahun 2008-2020. Data diperoleh dari Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Anggaran Daerah Kota Tasikmalaya.

1. Sejarah Berdirinya Kota Tasikmalaya

Rangkaian Sejarah Kota Tasikmalaya merupakan bagian dari rangkaian perjalanan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebagai daerah Kabupaten Induk sampai terbentuknya Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Pada tahun 1976 A. Bunyamin selaku Bupati Tasikmalaya periode 1976 sampai dengan 1981 menjadi tonggak sejarah lahirnya Kota Tasikmalaya dengan diresmikannya Kota Administratif Tasikmalaya melalui peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1976 oleh Menteri Dalam Negeri H. Amir Machmud. Peristiwa ini ditandai dengan penandatanganan Prasasti yang sekarang terletak di depan gedung DPRD lama Kabupaten Tasikmalaya. Pada waktu yang sama dilantik pula Walikota Administratif Pertama yaitu DRS. H. Oman Roosman oleh Gubernur KDH Tingkat I Jawa barat H. Aang Kunaefi.

Pada awal pembentukannya wilayah kota Administratif Tasikmlaya meliputi 3 kecamatan yaitu Cipedes, Cihideung dan Tawang dengan jumlah desa sebanyak 13 desa.

Berkat perjuangan unsur Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya yang dipimpin Bupati saat itu H. Suljana WH beserta tokoh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dirintislah pembentukan Kota Tasikmalaya dengan lahirnya tim sukses pembentukan Pemerintahan Kota Tasikmalaya yang diketuai oleh H. Yeng Ds. Partawinata SH. bersama tokoh - tokoh masyarakat lainnya. Melalui proses panjang akhirnya dibawah pimpinan Bupati Drs. Tatang Farhanul Hakim, pada tanggal 17 Oktober 2001 melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001, Kota Tasikmalaya diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden RI di Jakarta bersama-sama dengan kota Lhokseumawe, Langsa, Padang sidempuan, Prabumulih, Lubuk Linggau, Pager Alam, Tanjung Pinang, Cimahi, Batu, Sikawang dan Bau-bau.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya, telah mengantarkan Pemerintah Kota Administratif Tasikmalaya melewati pintu gerbang Daerah Otonomi Kota Tasikmalaya untuk menjadi daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangga sendiri.

Pembentukan Pemerintah Kota Tasikmalaya tak lepas dari peran serta semua pihak maupun berbagai stakeholder di daerah Kota Tasikmalaya yang mendukung pembentukan tersebut. Tentunya dengan pembentukan Kota Tasikmalaya harus ditindaklanjuti dengan menyediakan berbagai prasarana maupun sarana guna menunjang penyelenggaraan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Berbagai langkah untuk mempersiapkan prasarana, sarana maupun personil serta komponen-komponen lainnya guna menunjang

penyelenggaraan Pemerintahan Kota Tasikmalaya telah dilaksanakan sebagai tuntutan dari pembentukan daerah otonom itu sendiri.

Pada tanggal 18 Oktober 2001 pelantikan Drs. H. Wahyu Suradiharja sebagai PJ Walikota Tasikmalaya oleh Gubernur Jawa Barat dilaksanakan di Gedung Sate Bandung. Sesuai Undang-Undang No. 10 Tahun 2001 bahwa wilayah Kota Tasikmalaya terdiri dari 8 Kecamatan dengan jumlah Kelurahan sebanyak 15 dan Desa sebanyak 54, tetapi dalam perjalanannya melalui Perda No.30 Tahun 2003 tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, desa-desa dilingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya berubah statusnya menjadi Kelurahan, oleh karena itu maka jumlah kelurahan menjadi sebanyak 69 kelurahan, sedangkan kedelapan kecamatan tersebut antara lain:

- a. Kecamatan Tawang
- b. Kecamatan Cihideung
- c. Kecamatan Cipedes
- d. Kecamatan Indihiang
- e. Kecamatan Kawalu
- f. Kecamatan Cibeureum
- g. Kecamatan Mangkubumi
- h. Kecamatan Tamansari

Sebagai salah satu syarat Pemerintah Daerah Otonom diperlukan alat kelengkapan lainnya berupa Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Melalui surat keputusan No. 133 Tahun 2001 Tanggal 13 Desember 2001 Komisi Pemilihan Umum membentuk Panitia Pengisian Keanggotaan Dewan

Perwakilan Rakyat Kota Tasikmalaya (PPK-DPRD). Melalui proses dan tahapan-tahapan yang dilaksanakan PPK-DPRD Kota Tasikmalaya yang cukup panjang, maka pengangkatan anggota DPRD Kota Tasikmalaya disahkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 171/Kep.380/Dekon/2002 Tanggal 26 April 2002, selanjutnya tanggal 30 April 2002 diresmikannya keanggotaan DPRD Kota Tasikmalaya yang pertama kali.

Pada tanggal 14 November 2002 dilantiknya Bp. Drs. H. Bubun Bunyamin sebagai Walikota Tasikmalaya, pelantikan Walikota tersebut adalah sebagai puncak momentum dari pemilihan Kepala Daerah pertama di Kota Tasikmalaya sebagai hasil dari tahapan proses pemilihan yang dilaksanakan oleh Legislatif.

2. Visi dan Misi Kota Tasikmalaya

a. Visi

Dengan berlandaskan Iman dan Taqwa, Kota Tasikmalaya menjadi pusat perdagangan dan industri termaju di Priangan Timur tahun 2012.

b. Misi

Menurut Peraturan daerah Kota Tasikmalaya No. 2 Tahun 2003 Tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002-2007.

Misi adalah tugas yang diemban Pemerintah Kota Tasikmalaya meliputi:

- 1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang beriman dan bertaqwa
- 2) Meningkatkan kesadaran hukum dan menegakan supermasi hukum
- 3) Menumbuhkan kekuatan ekonomi kota

- 4) Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota
 - 5) Mengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup secara berkelanjutan
 - 6) Mengoptimalkan dan membangun sarana dan prasarana kota.
3. Sejarah Singkat BPKAD Kota Tasikmalaya

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dibentuk berdasarkan peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Jenis, tipologi dan tugas atau urusan Pemerintahan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Perangkat Daerah dengan tipe A yang melaksanakan tugas pengelolaan keuangan dan asset daerah.

4. Visi dan Misi BPKAD Kota Tasikmalaya
- a. Visi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mendukung untuk mewujudkan Visi Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 yaitu “Kota Tasikmalaya yang Religius, Maju dan Madani”. Visi tersebut mempunyai makna sebagai berikut:

Religius: Suatu kondisi, sikap dan prilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang mempunyai kedalaman penghayatan, pengalaman keagamaan dan keyakinannya terhadap Allah, Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dengan mematuhi segala perintah dan menjauhi larangan-nya dengan keikhlasan hati dan dengan seluruh jiwa raga serta memperhatikan tata nilai dan norma serta kearifan lokal.

Maju: Suatu kondisi, sikap dan perilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang kreatif, Produktif, inovatif, dan berdaya saing, disiplin, berpendidikan tinggi, sehat lahir dan batin, dapat menjaga tatanan sosial masyarakat dengan toleran, bergotong royong, rasional, arif, adaptif dan responsive terhadap dinamika perubahan serta ditunjang oleh infrastruktur dasar perkotaan yang memadai, nyaman, bersih dan berwawasan lingkungan.

Madani: Suatu kondisi, sikap dan perilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang sejahtera, maju, beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya, menjunjung tinggi etika dan moralitas, tata hukum dan demokratis.

b. Misi

Adapun misi dalam pencapaian visi tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal.
- 2) Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat.
- 3) Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
- 4) Memenuhi kebutuhan pelayanan kualitas sumber daya manusia.
- 5) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

5. Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD

Berdasarkan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas pokok dan rincian tugas unit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, adalah:

a. Tugas Pokok

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

b. Fungsi

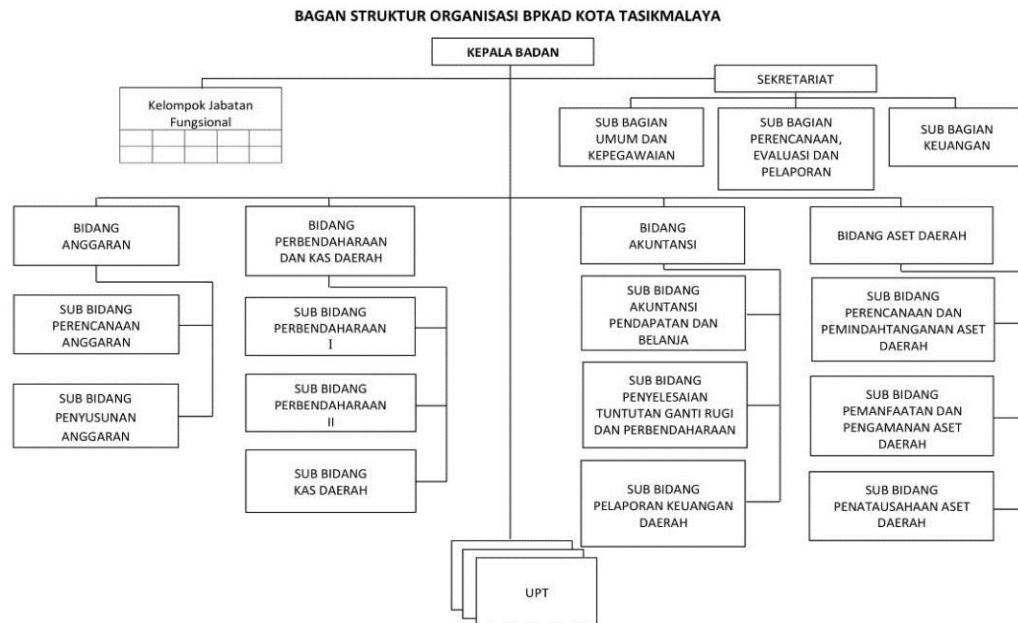
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam pengelolaan keuangan dan asset Daerah
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya
- 5) Pelaksanaan pengelolaan administrasi badan, dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota dan fungsinya

6. Susunan organisasi BPKAD Kota Tasikmalaya

Susunan Organisasi BPKAD Kota Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 terdiri dari 5 (lima) sub unit organisasi eselon 3 dengan susunan sebagai berikut :

- a. Kepala badan
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
- c. Bidang Anggaran membawahi :
 - 1) Sub Bidang Anggaran Pendapatan
 - 2) Sub Bidang Anggaran Belanja
- d. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Kas Daerah
 - 2) Sub Bidang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung
- e. Bidang Akuntansi, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Akuntansi Pendapatan
 - 2) Sub Bidang Akuntansi Belanja
- f. Bidang Aset Daerah, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah
 - 2) Sub Bidang Penataan dan Pendayagunaan Aset daerah



Sumber: www.bpkadtasikmalayakota.go.id

Gambar 3.1

Bagan Struktur Organisasi BPKAD Kota Tasikmalaya

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Metode Penelitian yang Digunakan

Metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan, karena Dalam menjalankan suatu penelitian untuk mencapai suatu tujuan ilmiah tidak terlepas dari penggunaan metode. metode penelitian adalah cara untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis (Sugiyono, 2017:2).

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan survey. Seperti yang dikemukakan oleh Mohammad Nazir (2014:57) bahwa Metode deskriptif analisis adalah suatu metode yang

meneliti status kelompok manusia, objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan sistematis, faktual dan akurat mengenai objek yang diteliti. Serta Penelitian ini dilakukan dengan cara mengungkap peristiwa atau data-data yang telah lalu. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Dengan melalui metode ini penulis memusatkan gambaran pemecahan masalah yang sedang berlangsung.

3.2.2 Operasionalisasi Variabel

Menurut Sugiyono (2013) operasinalisasi variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Sesuai dengan penelitian penulis yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Barang dan Jasa (Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010-2019)”, maka terdapat empat variabel yang terdiri dari tiga Variabel bebas (*Independent Variabel*) dan satu Variabel terkait (*dependent Variabel*) yaitu sebagai berikut:

1. Variabel bebas (*Independent Variabel*)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat secara positif maupun negatif. Menurut Sugiyono (2013) variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab

perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terkait). Yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini yaitu:

X_1 : Pendapatan Asli Daerah

X_2 : Dana Alokasi Umum

X_3 : Dana Alokasi Khusus

2. Variabel Terkait (*dependent Variabel*)

Variabel dependen atau variabel terkait merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013). Variabel Terkait pada penelitian ini adalah Belanja Barang dan Jasa (Y). Berdasarkan definisi konseptual kedua variabel tersebut diatas, dapat disimpulkan indikator kedua variabel sebagaimana diperlihatkan melalui tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasionalisasi	Indikator	Skala
-----------------	----------------------------------	------------------	--------------

X ₁ :Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber di dalam daerah yang di pungut Berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.33 Pasal 1 Thn 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah).	1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan 4. Lain-lain PAD yang sah	Rasio
Variabel	Definisi Operasionalisasi	Indikator	Skala
X ₂ :Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana yang bersumber dari APBN dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (PP No.55 Tahun 2005).	Total Realisasi Dana Alokasi Umum	Rasio
X ₃ :Dana Alokasi Khusus (DAK)	Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (PP No.55 Tahun 2005).	Total Realisasi Dana Alokasi Khusus	Rasio

Y: Belanja Barang dan Jasa	Pengeluaran atas pembelian barang dan jasa habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang dengan dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kembali kepada masyarakat/pemerintah daerah dan belanja perjalanan (PMK No.102 Tahun 2018).	Total Realisasi Belanja Barang dan Jasa	Rasio
----------------------------	--	---	-------

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

3.2.3.1 Jenis Data

Data yang digunakan dalam usulan penelitian ini merupakan jenis data Kuantitatif. Dimana data kuantitatif merupakan jenis penelitian yang datanya diperoleh/diwujudkan dalam bentuk angka-angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasil penelitian ini diwujudkan dalam angka. Menurut Sugiyono (2014: 224), bahwa data kuantitatif adalah data yang bersifat numerik atau angka yang dapat dianalisis dengan menggunakan statistik. Berdasarkan sifatnya, data kuantitatif dalam penelitian ini berupa data rasio. Dimana menurut Suryana (2014) yang menyatakan bahwa data rasio adalah data yang berbentuk angka dalam arti yang sesungguhnya karena dilengkapi dengan titik nol (mutlak) sehingga dapat diterapkan semua bentuk matematika.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara peninjauan langsung terhadap suatu objek penelitian dan hasil wawancara dengan pihak Badan, Dinas dan Kantor terkait (Sugiyono, 2014:223).

2. Data Sekunder

Data sekunder dapat berupa data yang diperoleh dari pihak luar selain objek penelitian. Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh tidak berhubungan langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data yang dimaksud adalah dokumen-dokumen yang ada dan jurnal-jurnal yang berhubungan langsung dengan kegiatan penelitian (Sugiyono, 2014:223).

3.2.3.2 Populasi Sasaran

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2014:80).

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa populasi merupakan wilayah generalisasi baik objek ataupun subyek yang memiliki kuantitas serta karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya dengan objek yang tidak hanya terpaku pada makhluk hidup, melainkan semua obyek penelitian yang dapat diteliti, tak hanya meliputi jumlah obyek yang diteliti, akan tetapi meliputi semua karakteristik serta sifat-sifat yang dimiliki obyek tersebut.

Pada penelitian ini yang menjadi populasi sasarannya yaitu Pemerintah Kota Tasikmalaya yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Anggaran Daerah Kota Tasikmalaya dengan ruang lingkup penelitian mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja barang dan jasa Kota Tasikmalaya selama 10 tahun terakhir, yang mana populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data Pendapatan asli daerah, Dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan Belanja barang dan jasa Kota Tasikmalaya selama 13 tahun untuk periode 2008-2020.

3.2.3.3 Prosedur Pengumpulan data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang diharapkan, maka dibutuhkan data dan informasi yang mendukung penelitian ini. Dalam memperoleh data dan informasi yang akan mendukung penelitian ini, maka penulis mengumpulkan data berupa:

1. Penelitian Lapangan (*field Resaerch*)

Penelitian lapangan (*field Resaerch*) Yaitu data yang diperoleh dari objek penelitian secara langsung guna memperoleh data primer yang diperlukan dalam kaitannya dengan penelitian.

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Teknik dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dengan cara melihat catatan, dokumen-dokumen. mengamati formulir serta laporan yang ada mengenai PAD, DAU, DAK serta Belanja Barang dan Jasa dalam laporan Realisasi APBD tahun anggaran 2008-2020 Data tersebut diperoleh langsung dari Kantor BPKAD Kota Tasikmalaya.

2. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur atau sumber-sumber bacaan lainnya untuk mempunyai kaitannya dengan masalah-masalah yang diteliti. Data sekunder ini digunakan sebagai pembanding yang akan mendukung dalam pembahasan hasil penelitian, sehingga penulis dapat menarik kesimpulan yang logis dari hasil penelitian pada dinas yang bersangkutan.

Dalam Penelitian ini penulis mengkaji teori yang diperoleh dari literatur, jurnal, media elektronik dan hasil penelitian terdahulu sebagai landasan kerangka berpikir dalam memahami masalah penelitian.

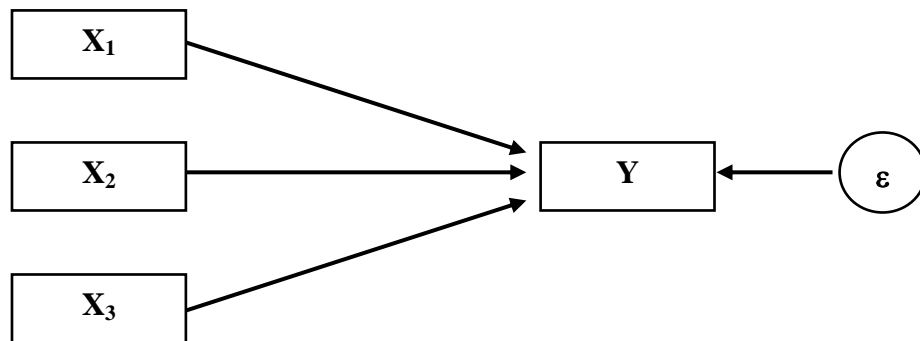
3.3 Model Penelitian

Model/Paradigma penelitian merupakan pandangan yang digunakan peneliti berisi bagaimana peneliti melihat realita, bagaimana mempelajari fenomena, cara-cara yang digunakan dalam penelitian dan cara-cara yang digunakan dalam menginterpretasikan temuan (Febri, 2017:22).

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah paradigma dengan empat variabel yaitu Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2), Dana Alokasi Khusus (X_3), dan Belanja Barang dan Jasa (Y) antar variabel tersebut saling mempengaruhi. Berdasarkan hal ini maka bentuk paradigma atau model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model data *time-series* (runtun-waktu) dengan menggunakan data Kuantitatif berbentuk Realisasi

Aangaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Tasikmalaya periode Tahun 2008-2020.

Hubungan antar variabel tersebut dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar 3.2
Model/ Paradigma Penelitian

Keterangan :

X₁: Pendapatan Asli Daerah

X₂: Dana Alokasi Umum

X₃: Dana Alokasi Khusus

Y: Belanja Barang dan Jasa

ε: Faktor lain yang tidak diteliti

3.4 Teknik Analisis Data

3.4.1 Teknik Analisis Data yang digunakan

Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan penulis agar dapat menjawab semua masalah yang akan diteliti maka di dalam melakukan uji

pengolahan data menggunakan *software IBM SPSS Statistics 25*. dengan metode statistika yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini terdiri dari tiga variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus serta satu variabel dependen yaitu belanja barang dan jasa, sehingga penelitian ini menggunakan persamaan regresi berganda. Menurut Sugiyono (2017:275) Analisis Regresi berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor predictor dimanipulasi.

Oleh karena itu, persamaan regresi yang digunakan adalah persamaan regresi ganda tiga predictor, yang dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

(Sugiyono, 2017:283)

Dimana:

Y : Belanja Barang dan Jasa

a : Konstanta

b_1, b_2, b_3 : Koefisien regresi PAD, DAU dan DAK

X_1 : Pendapatan Asli Daerah

X_2 : Dana Alokasi Umum

X_3 : Dana Alokasi Khusus

e : *error term* (faktor pengganggu/ residual)

2. Uji Asumsi Klasik

Menurut Agustia (2017:83) salah satu syarat yang menjadi dasar penggunaan model regresi berganda adalah dipenuhinya semua asumsi klasik, agar hasil pengujian bersifat tidak bias dan efisien (*Best Linear Unbiased Estimator/BLUE*). Jika asumsi tersebut dilanggar, misal model regresi tidak normal, terjadi multikolinearitas, terjadi heteroskedastisitas atau terjadi autokorelasi maka hasil analisis regresi dan pengujian secara Uji t dan Uji F menjadi tidak valid atau bias. Regresi berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat tersebut adalah data harus terdistribusi secara normal, tidak mengandung multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas atau Uji distribusi normal merupakan suatu asumsi yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual berasal dari populasi yang berdistribusi Normal. Seperti halnya bahwa uji t mengasumsikan nilai residual yang mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistika menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Untuk menguji formalitas data, peneliti ini menggunakan analisis Uji statistik non-parametrik *kolmogrov-smirnov* (K-S) yang merupakan uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual. Jika hasil uji non-parametrik menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data residual terdistribusi adalah normal. Sedangkan jika hasil uji *kolmogrov-smirnov* menunjukkan signifikansi

dibawah 0.05 maka data residual terdistribusi tidak normal. Jika data telah terdistribusi secara normal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik dalam analisis regresi linear berganda. Tujuan digunakannya uji multikolinearitas dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi (hubungan kuat) antar variabel dependen atau variabel independent. Uji Multikolinearitas ini digunakan karena pada analisis regresi terdapat asumsi yang mengisyaratkan bahwa variabel bebas (independen) harus terbebas dari gejala multikolinearitas atau tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala multikolinearitas dalam penelitian ini maka dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

- 1) Melihat nilai *Tolerance*. Jika nilai *Tolerance* lebih dari 0,10 maka artinya tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi begitupun sebaliknya, jika nilai *Tolerance* kurang dari 0,10 maka artinya telah terjadi multikolinearitas dalam model regresi.
- 2) Melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*). Jika nilai VIF lebih kecil dari 10,00 maka tidak terjadi multikolinearitas sedangkan jika nilai VIF lebih besar atau sama dengan 10,00 maka terjadi multikolineartitas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t (berada) dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul biasanya sering ditemukan pada data runtut waktu (*time series*) karena “gangguan” pada data individu atau kelompok yang sama atau pada periode berikutnya. Karena data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data *time series*, maka penulis menggunakan pengujian autokorelasi.

Menurut Agustia (2017:98) salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Terjadi autokorelasi positif, jika nilai DW dibawah -2 ($DW < -2$)
- 2) Terjadi autokorelasi, jika nilai DW berada diantara -2 dan $+2$ atau $-2 < DW < +2$
- 3) Terjadi autokorelasi negative, jika nilai DW diatas $+2$ atau $DW > +2$.

d. Uji Heteroskedastisitas

Dalam persamaan regresi berganda perlu diuji mengenai sama atau tidaknya varian dari residual antara observasi yang satu dengan yang lainnya. Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain atau untuk melihat penyebaran data.

Jika Variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Uji ini dapat dilakukan dengan melihat gambar plot melalui grafik *scatterplot* atau *Z prediction* (ZPRED) yang merupakan variabel bebas (sumbu X=Y hasil prediksi) dan nilai residualnya (SRESID) merupakan variabel terkait (sumbu Y=Y prediksi – Y riil). Homoskedastisitas terjadi jika pada Scatterplot titik-titiknya mempunyai pola yang teratur baik menyempit, melebar maupun bergelombang.

3. Analisis Koefisien Korelasi

Analisis koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar keeratan atau kekuatan hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Dalam analisis regresi, analisis korelasi digunakan untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Untuk menganalisis seberapa besar keeratan atau kekuatan hubungan antara variabel X dengan variabel Y dalam penelitian ini, penulis menggunakan *Zero-Order Correlations*.

Hasil perhitungan koefisien korelasi dapat bernilai positif atau negatif. Apabila nilai koefisien korelasi positif, berarti kedua variabel saling berhubungan. Sedangkan apabila nilai koefisien korelasi negatif, berarti kedua variabel tersebut saling berhubungan terbalik.

Di bawah ini interpretasi koefisien korelasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tingkat Keeratan Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,119	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

(Sugiyono, 2017:231)

3.4.2 Pengujian Hipotesis

1. Penetapan hipotesis operasional

- | | |
|-----------------------------------|---|
| $H_o : pyx_1 = 0$ | Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Barang dan Jasa. |
| $H_a : pyx_1 \neq 0$ | Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Barang dan Jasa. |
| $H_o : pyx_2 = 0$ | Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Barang dan Jasa. |
| $H_a : pyx_2 \neq 0$ | Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Barang dan Jasa. |
| $H_o : pyx_3 = 0$ | Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Barang dan Jasa. |
| $H_a : pyx_3 \neq 0$ | Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Barang dan Jasa. |
| $H_o : pyx_1 = pyx_2 = pyx_3 = 0$ | Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Barang dan Jasa. |

$H_a : pyx_1 \neq pyx_2 \neq pyx_3 \neq 0$ Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Barang dan Jasa.

2. Penetapan Tingkat signifikansi

Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) yang menunjukkan kemungkinan kebenaran hasil penarikan kesimpulan sebesar 95% atau toleransi kekeliruan sebesar 5%.

3. Uji signifikansi

a. Uji Parsial (Uji-t)

Menurut Ilham Ramadan (2018:63) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual apakah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Untuk pengujian secara parsial ini digunakan uji-t cara melakukan uji-t adalah dengan menggunakan rumus:

$$t = r_p \frac{\sqrt{n-k-1}}{\sqrt{1-r^2p}} \quad (\text{Sugiyono, 2017:290})$$

Dimana :

t : t hitung parsial

r_p : Korelasi parsial

n : Banyaknya sampel

k : Variabel independen

Cara untuk mengetahui signifikansinya yaitu dengan membandingkan nilai t hitung terhadap nilai t tabel. Apabila nilai t hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel maka berarti t hitung signifikan artinya hipotesis alternatif diterima yaitu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

b. Uji Simultan (uji – F)

Menurut ilham Ramadan (2018:64) uji statistik F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dengan melihat nilai signifikansi F.

Pengujian yang dilakukan ini adalah dengan uji parameter β (uji korelasi) dengan menggunakan uji F-statistik. Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen/terkait (Agustia, 2017).

Uji F dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi f pada output hasil regresi menggunakan SPSS dengan *significance level* ($\alpha = 5\%$). Jika nilai signifikansi lebih besar dari α maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan), yang berarti secara simultan variabel-variabel bebas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terkait. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari α maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti bahwa secara simultan variabel-variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terkait. Untuk menguji tingkat signifikansi

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersamaan digunakan uji F dengan rumus sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k-1)} \quad (\text{Sugiyono, 2017:297})$$

Keterangan :

R^2 : Koefisien determinasi

n : Banyaknya sampel

k : Variabel independen

Dengan level signifikansi $\alpha = 0,05$ dan derajat kebebasan df (k) : (n-k-1), maka Model dikatakan signifikan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

4. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (*R Square*) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi-variasi independen. Koefisien determinasi ini digunakan dengan tujuan dapat menjelaskan kebaikan dan model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Nilai korelasi r hanya menyatakan erat atau tidaknya hubungan antara Variabel X dan Variabel Y, semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

Nilai Koefisien determinasi adalah antara nol dari satu. Nilai *R Square* yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel dependen terbatas. Nilai yang mendekati satu dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel

dependen. Untuk mencari koefisien determinasi digunakan rumus sebagai berikut:

$$Kd = (r)^2 \times 100 \%$$

Dimana:

Kd : Koefisien determinasi

r^2 : Koefisien Korelasi dikuadratkan

5. Kaidah Keputusan

Secara Parsial:

Terima Ho jika $-t_{\frac{1}{2}\alpha} \leq t_{hitung} \leq t_{\frac{1}{2}\alpha}$ atau $t > t_{\frac{1}{2}\alpha} df(n - k - 1)$

Tolak Ho jika $-t_{\frac{1}{2}\alpha} > t_{hitung}$ atau $t_{hitung} > t_{\frac{1}{2}\alpha} df(n - k - 1)$

Secara Simultan:

Terima Ho jika $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ dan terima Ho jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$

3.4.3 Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis akan melakukan analisis secara kuantitatif dengan pengujian seperti pada tahap diatas. Kemudian hasil dari analisis penelitian tersebut akan ditarik suatu kesimpulan, yaitu mengenai hipotesis yang telah ditetapkan tersebut dapat diterima atau ditolak.

Untuk kemudahan dan juga atas dasar ketetapan atau akurasi dari hasil perhitungan, maka penulis dalam pembahasannya akan menggunakan program analisis *Statistical product and service solutions* (SPSS).